

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-undang perpajakan baru, yang terdiri atas:

UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai (Mardiasmo; 2013).

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya (Mardiasmo; 2013).

Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat yang tidak menimbulkan kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar pajak. (Prawoto; 2011). Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan - kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur artinya

dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah (Sukirno; 2010).

Pengeluaran Pemerintah adalah pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa (Sukirno; 2010). Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam

keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar. Di Indonesia pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah. Penerimaan pajak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah dan sebaliknya pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Maka penulis meneliti hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia Tahun 1980 – 2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pola hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia Tahun 1980-2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Pola hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia Tahun 1980-2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga: Sebagai bahan pertimbangan dari produk pendidikan universitas, peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang

yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggung jawab.

2. Bagi Pemerintah: Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi instansi-instansi dalam menetapkan suatu kebijakan tentang pengeluaran pemerintah.
3. Untuk penelitian selanjutnya perlu menggunakan metode dan alat analisis lain agar terjadi kesimpulan yang berbeda sehingga bisa menambah atau mengevaluasi teori-teori yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan jenis data runtun waktu (time series) untuk kurun waktu 1980-2012. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang digunakan meliputi data penerimaan pajak dalam negeri dan pengeluaran pemerintah pusat. Data-data tersebut diperoleh dari Nota Keuangan Pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), instansi yang terkait dan dari sumber-sumber lainnya yang relevan.

2. Definisi Operasional

Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat yang tidak menimbulkan kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar pajak. Menurut sifatnya pajak adalah wajib.(Prawoto,2011). Dalam penelitian ini, data yang dipakai mengacu pada pajak dalam negeri yang memiliki kemudahan dalam mengakses melalui berbagai media. Satuan yang digunakan adalah Miliyar rupiah.

Pengeluaran Pemerintah adalah pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi, dan ke atas jasa-jasa.(Sukirno,2010). Dalam penelitian ini, data yang dipakai mengacu pada pengeluaran pemerintah pusat yang memiliki kemudahan dalam mengakses melalui berbagai media. Satuan yang digunakan adalah Miliyar rupiah.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Kausalitas Granger. Formulasi model uji kausalitas Granger yakni:

$$Tx_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i Tx_{t-i} + \sum_{j=1}^m \beta_j G_{t-j} + U_t$$

$$G_t = \sum_{i=1}^m \lambda_i G_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j Tx_{t-j} + U_t$$

Dimana :

Tx : Penerimaan Pajak Dalam Negeri

G : Pengeluaran Pemerintah Pusat

n,m : jumlah lag

Ut : error

Langkah- langkah pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Uji stasioneritas

Suatu data urut waktu dikatakan stasioner apabila rata-rata, varian dan otokovarian ada berbagai waktu kelambanan (lag) bernilai konstan pada titik waktu yang manapun pengukuran dilakukan.(Utomo,2012)

Pada data urut waktu yang stasioner, pada dasarnya tidak ada gerakan tren yang bersifat sistematis, artinya perkembangan nilai variabel diakibatkan faktor random yang stokastik.(Utomo,2012)

Metode pengujian stasioneritas yang dipakai pada penelitian ini adalah uji ADF (Augmented Dickey Fuller) dengan waktu kelambanan maksium (k) sebesar $N^{1/3}$. Model pengujiannya adalah sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \delta Y_{t-1} + \alpha \sum_{i=1}^k \Delta Y_{t-i} + U_t$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \delta Y_{t-1} + \alpha \sum_{i=1}^k \Delta Y_{t-i} + U_t$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + \alpha \sum_{i=1}^k \Delta Y_{t-i} + U_t$$

Hipotesis uji ADF adalah $H_0 : \delta = 0$ (data tidak stasioner) dengan $H_A : \delta < 0$ (data stasioner). Apabila koefisien $\delta > 0$ (positif), maka uji ADF tidak valid dikarenakan data urut waktu yang diuji bersifat eksplosif. Model uji ADF terbaik adalah model yang memiliki nilai Akaike information criterion (aic) minimum.(utomo,2012)

2. Uji Otokorelasi

Otokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini, atau masa datang.

3. Uji Kausalitas Granger

Formulasi model uji kausalitas Granger yakni:

$$Tx_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i Tx_{t-i} + \sum_{j=1}^m \beta_j G_{t-j} + U_t$$

$$G_t = \sum_{i=1}^m \lambda_i G_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j Tx_{t-j} + U_t$$

Dimana :

Tx : Penerimaan Pajak Dalam Negeri

G : Pengeluaran Pemerintah Pusat

n, m : jumlah lag

U_t : error

Empat kemungkinan hubungan kausalitas antara Y (inflasi) dan X (jumlah uang beredar) akan muncul dari uji kausalitas:

1. Kausalitas satu arah TX (penerimaan pajak dalam negeri) mempengaruhi atau menyebabkan G (pengeluaran pemerintah pusat), bila koefisien lag TX (penerimaan pajak dalam negeri) pada persamaan (1) sebagai keseluruhan secara statistik tidak sama dengan 0 ($\sum \beta_j \neq 0$) dan koefisien lag G (pengeluaran pemerintah) pada persamaan (2) sebagai keseluruhan secara statistik sama dengan 0 ($\sum \delta_j = 0$).
2. Kausalitas satu arah G (pengeluaran pemerintah pusat) mempengaruhi atau menyebabkan, TX (penerimaan pajak dalam negeri) bila koefisien lag G (pengeluaran pemerintah pusat) pada persamaan (2) sebagai keseluruhan secara statistik tidak sama dengan 0 ($\sum \delta_j \neq 0$) dan koefisien lag TX (penerimaan pajak dalam negeri) pada persamaan (1) sebagai keseluruhan secara statistik sama dengan 0 ($\sum \beta_j = 0$).
3. Kausalitas dua arah TX (penerimaan pajak dalam negeri) mempengaruhi atau menyebabkan G (pengeluaran pemerintah pusat), dan G (pengeluaran pemerintah pusat) mempengaruhi atau menyebabkan TX (penerimaan pajak dalam negeri), bila secara statistik sama dengan 0 ($\sum \delta_j = 0$).
4. TX (penerimaan pajak dalam negeri) dan G (pengeluaran pemerintah pusat) adalah independen satu sama lain, bila koefisien lag TX (penerimaan pajak dalam negeri) pada persamaan (1) sebagai keseluruhan secara statistik sama dengan 0 ($\sum \beta_j \neq 0$) dan koefisien lag

G (pengeluaran pemerintah pusat) pada persamaan (2) sebagai keseluruhan secara statistik sama dengan 0 ($\sum \delta_j = 0$).

Secara teknis untuk mengetahui apakah koefisien lag TX(penerimaan pajak dalam negeri) pada persamaan (1) sebagai keseluruhan secara statistik tidak sama dengan 0 ($\sum \beta_j \neq 0$) dilakukan koefisien lag TX (penerimaan pajak dalam negeri) pada persamaan (1) sebagai keseluruhan secara statistik tidak sama dengan 0 ($\sum \beta_j \neq 0$) dan koefisien lag G (pengeluaran pemerintah pusat) pada persamaan (2) sebagai keseluruhan secara statistik tidak sama dengan 0 ($\sum \beta_j \neq 0$) dilakukan tahapan uji F sebagai berikut:

- 1) Regres persamaan (1) dengan hanya menyertakan unsur lag G, dengan nilai lag maksimum (m), yang kita inginkan.

$$G_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i G_{t-i} - 1 + U_t$$

Regresi ini disebut sebagai regresi restricted. Dari regresi ini, hitung residual sum of square-nya, RSS_R .

- 2) Regres persamaan (1) secara lengkap dengan nilai lag maksimum (m), yang sama dengan tahap 1, baik untuk lag variabel TX maupun G. Regresi ini disebut sebagai regresi unrestricted. Dari regresi ini, hitung residual sum of square-nya, RSS_{UR} .
- 3) Hipotesis nol uji ini adalah $H_0: \sum \beta_j = 0$, yang berarti unsur lag R tidak termasuk dalam regresi tahap 2 atau berarti TX (penerimaan pajak dalam

negeri) tidak mempengaruhi atau tidak menyebabkan G (pengeluaran pemerintah pusat)

4) Hitung F-hitung dengan rumus sbb:

$$F = \frac{(RSS_R - RSS_{UR}) / m}{RSS_{UR} / (n - k)}$$

Dimana m jumlah lag maksimum, n jumlah data pada pada regresi tahap 2, dan k adalah jumlah parameter pada regresi tahap 2.

5) Jika $F\text{-hitung} \leq R(\alpha, m, n-k)$ maka H_0 diterima, berarti secara statistik $\sum \beta_j = 0$, jadi TX (penerimaan pajak dalam negeri) tidak mempengaruhi atau tidak menyebabkan G (pengeluaran pemerintah pusat). Jika $F\text{-hitung} > F(\alpha, m, n-k)$ maka H_0 ditolak, berarti secara statistik $\sum \beta_j \neq 0$, jadi TX (penerimaan pajak dalam negeri) mempengaruhi atau menyebabkan G (pengeluaran pemerintah pusat).

Cara yang sama tentu saja harus digunakan untuk mengetahui apakah $\sum \beta_j \neq 0$ atau X(pengeluaran pemerintah pusat) mempengaruhi atau menyebabkan TX (penerimaan pajak dalam negeri).

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun seagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan yang dipilih dari berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian, hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis penelitian dan pembahasannya, pembuktian hipotesis serta inteprestasi ekonomi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.